



**INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN (AKD)
TIM SENERGI BADAN KEAHLIAN SETJEN DPR RI**

**KEGIATAN
26 JANUARI – 08 FEBRUARI 2021**



BADAN KEAHLIAN DPR RI

***BRIDGING THE RESEARCH TO THE ROLE AND FUNCTIONS OF PARLIAMENT
“EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING”***

**INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
TIM SENERGI BADAN KEAHLIAN
SETJEN DPR RI**

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
1.	KOMISI I	<p>1. Sehubungan dengan belum ditetapkannya RUU tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 dalam Rapat Paripurna DPR RI, maka Panja Pembahasan RUU tentang PDP tidak melaksanakan pembahasan RUU tentang PDP pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021. Namun demikian, Komisi I DPR RI telah mengajukan kembali perpanjangan waktu untuk pembahasan RUU tentang PDP.</p> <p>2. Raker dan RDP Komisi I DPR RI dengan Kemlu, Kemkominfo, BIN, BSSN, Lemhannas, Wantannas, Bakamla, LPP TVRI, LPP RRI, KPI Pusat, KIP, dan Dewan Pers dalam rangka evaluasi pencapaian kinerja Tahun 2020, realisasi Anggaran Tahun 2020, serta persiapan dan kesiapan pelaksanaan APBN Tahun 2021. Pelaksanaan fungsi anggaran ini, dilaksanakan bersamaan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, yaitu:</p> <p>a) RDPU dengan ORARI, Komisi I DPR RI memberikan apresiasi atas peran ORARI dalam memberikan dukungan komunikasi, baik dalam kondisi bencana dan non bencana di Indonesia, dan kedepannya Komisi I DPR RI mendorong agar ORARI makin berperan lebih optimal dalam dukungan komunikasi, termasuk informasi terkait pandemi Covid 19. Disamping itu, Komisi I DPR RI akan mendorong Kemkominfo untuk melibatkan ORARI dan RAPI dalam pembahasan Rancangan Peraturan Menkominfo pengganti Permen Kominfo</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk.</p> <p>b) Raker dengan Kemlu (Rapat tertutup), Komisi I DPR RI mendapatkan penjelasan mengenai Perkembangan Diplomasi Vaksin Covid-19 guna Program Vaksinasi Nasional; kebijakan perlindungan WNI di luar negeri dalam menghadapi gelombang kedua Covid-19; dan kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap perkembangan di dunia dan kawasan: perkembangan di AS, Palestina, Afganistan, dan stabilitas di Kawasan Indo-Pasifik.</p> <p>c) RDP dengan Lemhannas dan Wantannas, Komisi I mendorong:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Lemhannas untuk terus melakukan kajian strategis yang diperuntukkan sebagai bahan masukan kepada Pemerintah dalam rangka menuju pencapaian sasaran pembangunan nasional. 2) Wantannas untuk terus meningkatkan tugas, peran, dan fungsi seiring perkembangan jaman yang semakin terbuka dengan adanya perkembangan teknologi informasi komunikasi dan media sosial yang akan dijadikan rujukan dalam pengambilan kebijakan. <p>d) Raker dengan Kominfo, Komisi I DPR RI mendorong Kemkominfo untuk melaksanakan program-program strategis di T.A 2021, sebagai berikut: Soal <i>Analog Switch Off</i>; Pembangunan Infrastruktur TIK; Komunikasi Publik soal Vaksinasi; RUU Pelindungan Data Pribadi; Pembangunan Pusat Data Nasional; Pelibatan ORARI dalam mendiskusikan</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>rancangan pengganti Permenkominfo No.17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk; dan Penyiapan <i>Showcase</i> 5G.</p> <p>e) RDP dengan KPI, KIP, dan Dewan Pers, Komisi I mendorong:</p> <p>KPI Pusat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menuntaskan revisi P3SPS, paling lambat pertengahan tahun 2021; 2) Memaksimalkan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan di masa Pandemi Covid-19 pada lembaga penyiaran; dan, 3) Melakukan langkah strategis secara berkesinambungan agar <i>Analog Swicth Off</i> (ASO) pasca UU tentang Cipta Kerja dapat berjalan dengan baik. <p>KI Pusat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menerapkan Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) sebagai upaya peningkatan kualitas layanan informasi pada masyarakat; 2) Meningkatkan penyelesaian sengketa informasi publik secara lebih optimal; dan, 3) Melakukan langkah strategis terkait keterbukaan informasi publik sebagai modal pemerintahan digital Indonesia. <p>Dewan Pers</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan upaya perlindungan tugas pers dan penguatan kualitas Perusahaan Pers secara lebih optimal; dan,

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>2) Melakukan langkah strategis terkait penguatan Pers Nasional untuk tetap bertahan menghadapi krisis di masa Pandemi Covid-19.</p> <p>f) RDP dengan Bakamla, Komisi I DPR RI dan Bakamla mempunyai pandangan yang sama akan pentingnya percepatan RUU tentang Keamanan Laut yang substansinya antara lain memberikan peran dan kewenangan yang lebih kepada Bakamla dari posisi saat ini.</p> <p>g) RDP dengan LPP TVRI dan LPP RRI, Komisi I DPR RI meminta LPP TVRI dan LPP RRI untuk memperhatikan dan menindaklanjuti pandangan Komisi I DPR RI sebagai berikut: penguatan kelembagaan; peningkatan peran LPP; persiapan <i>Analog Switch Off</i>; percepatan penyelesaian RPP Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran; percepatan Pembahasan Revisi masing-masing PP; dan permintaan Komisi I DPR RI untuk Pelaporan LPP terkait Barang Milik Negara/Aset Negara. Selain itu Komisi I DPR RI telah menyampaikan Surat susulan kepada Pimpinan DPR RI terkait dengan Pengganti Anggota Dewas LPP TVRI Periode 2017-2022 yang diberhentikan.</p> <p>h) RDP dengan BSSN, Komisi I DPR RI dan BSSN mempunyai pandangan yang sama akan pentingnya RUU tentang Ketahanan dan Keamanan Siber yang salah satu substansi penting yang perlu diatur adalah pengaturan strategi nasional keamanan siber. Selanjutnya Komisi I DPR RI mengingatkan BSSN atas salah satu kesimpulan Raker tanggal 25 Juni 2020 yang pada intinya Komisi I DPR RI mendorong BSSN agar terus meningkatkan upaya pengamanan dan meminimalisir risiko ancaman informasi di ruang siber dengan</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>memanfaatkan hasil karya sendiri dan atau berkolaborasi dengan berbagai kementerian/lembaga negara dalam mewujudkan aplikasi yang relatif aman dari berbagai jenis ancaman, serangan, peluang dan tantangan perkembangan ruang siber.</p> <p>i) RDP dengan BIN (Rapat tertutup), Komisi I DPR RI mendapatkan penjelasan mengenai pemetaan dalam menghadapi gelombang kedua Covid-19 dan deteksi dini pengamanan distribusi vaksin Covid-19; Temuan <i>Seaglider</i> di Perairan Selayar, Sulawesi Selatan; isu separatis Papua; dan stabilitas keamanan dalam negeri.</p>
2.	KOMISI II	<p>1. Saat ini Komisi II DPR RI sedang melakukan sejumlah RUU penyesuaian yang dasar pembentukannya dibuat di zaman RIS. Terdapat 13 RUU dan satu diantaranya yakni RUU tentang Provinsi Bali telah diselesaikan sebelumnya oleh Badan Keahlian DPR. Adapun saat ini 12 RUU tentang Provinsi lainnya yang juga merupakan RUU Kumulatif Terbuka berdasarkan RDP dengan Badan Keahlian DPR RI sedang disusun. RUU tersebut yakni RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat, RUU tentang Provinsi Kalimantan Selatan, RUU tentang Provinsi Kalimantan Timur, RUU tentang Provinsi Jambi, RUU tentang Provinsi Sumatera Barat, RUU tentang Provinsi Riau, RUU tentang Provinsi NTT, RUU tentang Provinsi NTB, RUU tentang Provinsi Sulawesi Utara, RUU tentang Provinsi Sulawesi Tengah, RUU tentang Provinsi Sulawesi Selatan, dan RUU tentang Provinsi Sulawesi Tenggara.</p> <p>2. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah dilakukan RAKER TK I Ke-1 RUU ASN dengan MENPAN RB, MENKEU, MENDAGRI dan</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>MEKUMHAM. Adapun pada saat ini pemerintah memandang masih belum perlu melakukan perubahan terhadap UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Melakukan rapat kerja/rapat dengar pendapat terkait evaluasi pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 dengan Kementerian Dalam Negeri RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Berdasarkan rapat tersebut diperoleh informasi yakni masih terdapat pelanggaran dan sengketa Pilkada, masih adanya indikasi praktik Politik Uang (<i>Money Politic</i>), masih ditemukan permasalahan dalam Daftar Pemilih Tetap, pelanggaran Netralitas ASN, Polri/TNI, dan masih lemahnya komunikasi dan koordinasi antar Penyelenggara Pemilu. 4. Melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Tim Pemekaran Papua (Se-Tanah Tabi dan Saireri) dan Badan Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias. 5. Melakukan rapat dengar pendapat umum dengan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Ketua LSM Pemerhati Pelayanan Publik terkait meminta masukan terhadap Calon Anggota Ombudsman RI Periode 2021-2026. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Ketua LSM Pemerhati Pelayanan Publik (MPPP) memberikan saran dan masukan terhadap Ombudsman RI (ORI) secara kelembagaan serta masukan kepada para Calon Anggota ORI 2021-2026 yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM dan kinerja ORI ke depan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Saran dan masukan dari YLKI dan MPPP dijadikan bahan pertimbangan dalam proses pemilihan Calon Anggota ORI Masa Jabatan 2021-2026.

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>6. Pada tanggal 26-27 Januari 2021 sedang dilakukan <i>fit and proper test</i> calon anggota Ombudsman RI periode 2021-2026. Adapun pada tanggal 28 Januari 2021 Komisi II DPR RI telah memilih dan menetapkan 9 (sembilan) calon yang terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, dan para anggota Ombudsman yakni sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mokh Najih, Dr., SH., M.Hum (Ketua); 2) Bobby Hamzar Rafinus, Ir.,MIA (Wakil Ketua) 3) Dadan Suparjo Suharmawijaya, S.IP.,M.IP; 4) Hery Susanto, S.Pi.,M.Si 5) Indraza Marzuki Rais 6) Jemsly Hutabarat, Ir., SH.,MM 7) Johannes Widiantoro, Dr., SH., MH 8) Robertus Na Endi Jaweng 9) Yeka Hendra Fatika, SP.
3.	KOMISI III	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Kerja dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dengan kesimpulan: <ol style="list-style-type: none"> a. meminta Jaksa Agung untuk mengoptimalkan kinerja di tahun 2021 melalui pengalokasian anggaran yang lebih proporsional dalam rangka penguatan kewenangan institusi Kejaksaan termasuk Kejaksaan di daerah; b. meminta Jaksa Agung untuk meningkatkan kualitas penanganan perkara secara cermat dan teliti dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, transparan, dan berkeadilan dengan tetap

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>memastikan penegakan hukum yang dilakukan mampu secara seimbang membantu dalam pengembalian kerugian negara;</p> <p>c. mendukung upaya digitalisasi yang sedang dilakukan oleh Kejaksaan dan mendukung Jaksa Agung untuk mengoptimalkan pelaksanaannya dengan mekanisme pengawasan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel sehingga memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan.</p> <p>2. Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Kalimantan Selatan, dengan tujuan:</p> <p>a. mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan dari sistem penegakan hukum terutama dalam mencegah maupun melakukan penyelamatan terhadap kebocoran dan lubang di sektor penerimaan negara yang dalam hal ini di bidang Sumber Daya Alam; dan</p> <p>b. melihat profesionalitas dan akuntabilitas kinerja aparat penegak hukum dalam menjalankan tupoksinya serta mengetahui secara komprehensif implementasi pola koordinasi sistem penegakan hukum dan keamanan dengan seluruh pihak terkait.</p> <p>Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Selatan, Komisi III DPR RI memberikan sumbangan sembako kepada masyarakat yang terkena musibah banjir.</p> <p>3. Memberikan Persetujuan Calon Hakim <i>Ad Hoc</i> pada Mahkamah Agung, atas nama:</p> <p>a. Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H., (Hakim <i>Ad Hoc</i> Tipikor);</p> <p>b. Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., (Hakim <i>Ad Hoc</i> Hubungan Industrial); dan</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		c. Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., (Hakim <i>Ad Hoc</i> Hubungan Industrial).
4.	KOMISI IV	<p>1. Komisi IV DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Eselon 1 Kementerian Pertanian tanggal 2 dan 3 Februari 2021; dan Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian tanggal 8 Februari 2021 dalam rangka membahas <i>refocusing</i> kegiatan dan realokasi anggaran terkait penghematan anggaran Belanja Kementerian Pertanian TA 2021 sebesar Rp6.326.902.504.000,00 dari pagu semula sebesar Rp21.838.977.027.000,00 menjadi sebesar Rp15.512.074.523.000,00. Beberapa hal yang menjadi pembahasan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kementerian Pertanian agar merancang program dan kegiatan berdasarkan tupoksi, skala prioritas, dan sesuai kebutuhan di daerah sehingga berdampak langsung kepada petani serta kegiatan memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan produksi pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian nasional. b. Kementerian Pertanian agar melakukan evaluasi seluruh kegiatan yang selalu menimbulkan masalah atau menjadi temuan BPK, dan meminta Kementerian Pertanian tidak mengusulkan kembali kegiatan yang bermasalah/temuan BPK serta direalokasi pada kegiatan baru atau kegiatan lain yang lebih baik dan bermanfaat untuk masyarakat. Selanjutnya Kementerian Pertanian untuk tidak melaksanakan kegiatan dan program yang tidak disepakati dalam rapat ini. c. Kementerian Pertanian agar memperhatikan Petani yang mengalami gagal panen secara cermat akibat dampak bencana alam banjir atau kekeringan agar mereka tetap memiliki

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>penghasilan dan dapat tetap berproduksi, antara lain; melalui bantuan kegiatan padat karya, bantuan sarana produksi, serta program asuransi pertanian guna mengurangi risiko kerugian.</p> <p>d. Kementerian Pertanian agar meningkatkan peran tenaga Penyuluh dalam melakukan pendampingan, penyuluhan serta menyebarluaskan program Kementerian Pertanian. Selanjutnya Kementerian Pertanian didorong untuk melibatkan lulusan SMK Pembangunan Pertanian dan Politeknik Pembangunan Pertanian dalam upaya mengatasi kekurangan tenaga penyuluh pertanian.</p> <p>e. Pemerintah agar menyelesaikan permasalahan pupuk bersubsidi utamanya terkait dengan ketersediaan dan penyaluran sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat. Selanjutnya meminta Pemerintah segera untuk mengkaji luasan maksimum setiap petani yang mendapat alokasi bantuan pupuk bersubsidi, dengan harapan sebaran petani penerima pupuk bersubsidi semakin meningkat.</p> <p>f. Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) segera memberikan <i>Time line</i>/jadwal dalam penyelesaian pembagian Kartu Tani termasuk dengan penyelesaian pengadaan/pengoperasian infrastruktur Tahun 2021. Selanjutnya, meminta kepada HIMBARA untuk melaporkan secara berkala per-3 bulan progres pembagian Kartu Tani beserta penggunaannya.</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>g. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Pertanian untuk meningkatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pertanian di Tahun 2022 untuk mendukung program Ketahanan Pangan nasional dengan kriteria yang disusun kemudian.</p> <p>2. Komisi IV DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Eselon 1 Kementerian Pertanian tanggal 2 dan 3 Februari 2021; dan Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian tanggal 8 Februari 2021 dalam rangka membahas <i>refocusing</i> kegiatan dan realokasi anggaran terkait penghematan anggaran Belanja Kementerian Pertanian TA 2021 sebesar Rp6.326.902.504.000,00 dari pagu anggaran semula sebesar Rp7.957.114.783.000,00 menjadi sebesar Rp7.437.736.258.000,00. Beberapa hal yang menjadi pembahasan antara lain:</p> <p>a. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah untuk melaksanakan pengembangan pemanfaatan sampah menjadi bahan baku energi <i>Refuse-Derived Fuel</i> (RDF) dalam rangka menyelesaikan permasalahan pengelolaan sampah di Indonesia, dan selanjutnya meminta KLHK untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai kelayakan usaha pengembangan RDF sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pemanfaatan sampah perkotaan sebagai bahan baku energi.</p> <p>b. Komisi IV DPR RI kembali mendorong KLHK untuk melakukan penegakan hukum atas kasus penggunaan kawasan hutan non prosedural, khususnya untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit dan pertambangan, dan selanjutnya meminta KLHK untuk meningkatkan koordinasi dengan K/L terkait, termasuk aparat penegak hukum, dalam rangka meningkatkan target</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>penyelesaian proses penegakan hukum atas kasus kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan, dimana selama periode 2015-2020 terdapat sekitar Rp19,3 Triliun dari 28 kasus gugatan yang belum tereksekusi.</p> <p>c. Komisi IV DPR RI mendorong KLHK serta BRGM untuk melaksanakan percepatan pelaksanaan kegiatan RHL, termasuk di dalamnya rehabilitasi ekosistem gambut dan mangrove, dengan terus meningkatkan koordinasi dengan K/L terkait, diantaranya dengan KKP, Kementan, dan Kementerian BUMN serta Pemerintah Daerah.</p> <p>d. Komisi IV DPR RI mendorong KLHK untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan atas pelaksanaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan rehabilitasi DAS yang menjadi kewajiban perusahaan pemegang IPPKH; serta 2) Pembayaran kewajiban PNBK Penggunaan Kawasan Hutan tertunggak yang menjadi kewajiban Pemegang Izin, baik IUPHH, IUP Jasa Lingkungan, maupun IPPKH. <p>Selanjutnya, Komisi IV DPR RI mendukung dilakukannya pencabutan izin usaha bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban yang harus dilakukan.</p> <p>e. Komisi IV DPR RI mendorong KLHK untuk memprioritaskan program dan kegiatan dalam rangka menjaga kawasan hutan serta menjaga hutan yang saat ini masih tersisa. Hal ini menjadi <i>concern</i> Komisi IV DPR RI mengingat kondisi (baik kualitas maupun kuantitas) hutan Indonesia yang semakin turun.</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>f. Komisi IV DPR RI mendukung KLHK untuk melaksanakan program pengembangan tanaman bambu, dan mendorong pengalokasian anggaran dalam rangka penyiapan bibit jenis bambu pada wilayah yang memiliki kesesuaian lahan untuk tanaman bambu, seperti kanan kiri sungai, daerah dengan kelerengan curam, serta daerah rawan longsor. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta KLHK untuk melakukan kajian atas potensi pengembangan hutan bambu di Indonesia, mengingat manfaat dari pengembangan hutan bambu berupa restorasi ekosistem dan peningkatan ekonomi bagi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.</p> <p>g. Komisi IV DPR RI meminta KLHK c.q. Ditjen PSLB3 untuk meningkatkan alokasi anggaran dalam rangka memberikan bantuan untuk pengolahan sampah organik dan anorganik kepada Pemerintah Daerah, sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>h. Komisi IV DPR RI meminta KLHK untuk melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atas kebijakan pengelolaan kawasan hutan (baik penggunaan maupun pelepasan kawasan hutan) yang mengakibatkan penurunan luas kawasan hutan, yang menjadi salah satu penyebab kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>i. Komisi IV DPR RI meminta agar KLHK dapat mendukung Komisi IV DPR RI untuk melakukan penyusunan RUU atas Perubahan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dalam rangka menjaga kelestarian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Indonesia.</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>j. Komisi IV DPR RI meminta agar RPP sebagai peraturan pelaksana UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di sektor Kehutanan dapat diatur bahwa tanggung jawab pengelolaan kawasan hutan serta pemulihan lingkungan dalam rangka kecukupan kawasan hutan dan penutupan lahan menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pemerintah Pusat, melalui kewenangan Menteri yang membidangi Kehutanan. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI mendorong KLHK untuk melakukan percepatan pengukuhan kawasan hutan, mulai dari proses penunjukan, penataan batas, pemetaan, dan penetapan kawasan hutan.</p> <p>k. Komisi IV DPR RI mendukung usulan penambahan Pagu Anggaran BRGM TA 2021 yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi mangrove, dengan melibatkan masyarakat.</p> <p>l. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian LHK untuk meningkatkan pengawasan dan pembinaan kepada seluruh Lembaga Konservasi di Indonesia. Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian LHK untuk memberikan sanksi yang tegas kepada Lembaga Konservasi yang terbukti melakukan kesalahan dan kelalaian.</p> <p>m. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian LHK untuk melakukan pembinaan kepada seluruh pemegang izin industri agar terus melakukan upaya pengendalian pencemaran lingkungan akibat operasional industri yang dilakukannya. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian LHK untuk mendorong seluruh pemegang izin industri untuk melakukan</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>pembinaan, pemberdayaan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi industri.</p> <p>n. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian LHK untuk menyusun strategi dalam rangka percepatan target pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan, mulai dari proses penunjukkan, penataan batas, pemetaan, dan penetapan kawasan hutan sebagai tindak lanjut pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam rangka menyelesaikan konflik tenurial yang saat ini banyak terjadi serta memberikan kepastian investasi pada usaha yang memiliki kegiatan pada areal di dalam Kawasan Hutan.</p> <p>o. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian LHK untuk menyusun strategi dalam rangka percepatan target pelaksanaan pengembangan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistem, termasuk di dalamnya pengembangan wisata alam di dalam kawasan konservasi, dengan catatan tidak merusak bentang alam, yang berpotensi meningkatkan PNBPN di sektor lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>p. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian LHK untuk melakukan kajian atas urgensi peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di lingkup Kementerian LHK dalam rangka pelaksanaan tugas penjagaan kawasan hutan serta pendampingan dalam pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI mendukung Kementerian LHK untuk mengajukan penambahan jumlah Polisi Hutan (Polhut) kepada Kementerian PANRB.</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>q. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian LHK meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/ Lembaga terkait serta Pemerintah Daerah (baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi terkait pencegahan dan pemberantasan perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar.</p> <p>r. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian LHK untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2004.</p> <p>s. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian LHK untuk meningkatkan Pagu Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p> <p>3. Komisi IV DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal 4 Februari 2021; dan Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan tanggal 27 Januari dan 9 Februari 2021 dalam rangka membahas <i>refocusing</i> kegiatan dan realokasi anggaran terkait penghematan anggaran Belanja Kementerian Pertanian TA 2021 sebesar Rp157.665.596.000,00 dari pagu anggaran semula sebesar Rp6.652.139.393.000,00 menjadi sebesar Rp6.494.473.797.000,00. Beberapa hal yang menjadi pembahasan antara lain:</p> <p>a. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait realisasi penyerapan anggaran tahun 2020 sebesar 91,27% atau sebesar Rp4.809.642.208.000,00</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>(empat triliun delapan ratus sembilan miliar enam ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan ribu rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp5.269.641.991.000,00 (lima triliun dua ratus enam puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).</p> <p>b. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk berkomitmen mengalokasikan kembali program dan kegiatan bantuan pemerintah di tahun 2021 melalui APBN-P, terutama Anggaran Belanja Tambahan (ABT) tahun 2020 yang belum tersalurkan (tertransfer) ke kelompok-kelompok masyarakat yang sudah mendapatkan Surat Keputusan (SK) di Direktorat Jenderal Perikanan Budi daya, karena adanya 7 Surat Perintah Membayar (SPM) gagal validasi di Kementerian Keuangan sebesar Rp114,85 miliar beserta anggaran pendampingan kelompok, yakni bantuan ikan konsumsi, udang, ikan hias, cacing sutera, kepiting dan budi daya ikan dalam ember, mengingat masyarakat kelautan perikanan belum merasakan dampak positifnya dan merasa kecewa/tercederai, maka perlu menjadi prioritas kembali agar percepatan dan pemulihan ekonomi untuk masyarakat kelautan perikanan menuju kesejahteraan di masa pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dapat tercapai.</p> <p>c. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengupayakan kepada Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas agar melakukan penambahan alokasi anggaran tahun 2021 dan tidak melakukan pemotongan anggaran kembali di Kementerian Kelautan dan Perikanan karena berdasarkan data yang ada</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>hingga saat ini anggarannya tidak sampai 1% dari APBN, serta mengingat sektor kelautan perikanan merupakan pangan yang menjadi kebutuhan dasar rakyat sehari-hari sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.</p> <p>d. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk berkomitmen dalam menjalankan/melaksanakan Program dan Kegiatan tahun 2021 sesuai dengan target dan sasaran yang sudah disepakati di dalam Rapat Dengar Pendapat hari ini agar pelaksanaan dan implementasinya dilakukan dengan cepat, tepat dan fokus, sesuai dengan waktu yang tersedia dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kelautan perikanan.</p> <p>e. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan pengawasan patroli secara optimal di daerah-daerah yang mempunyai potensi jalur penyelundupan lalu-lintas Benih Bening Lobster (BBL) secara illegal.</p> <p>f. Komisi IV DPR RI mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mencabut perizinan kebijakan ekspor Benih Bening Lobster (BBL) ke luar negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan karena hingga saat ini belum diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sehingga hal tersebut menjadikan adanya peluang terjadinya penyimpangan dan pelanggaran, sebaiknya Kementerian Kelautan dan Perikanan fokus melakukan budi daya lobster agar nilai jualnya lebih bagus/tinggi dan ekosistem dapat lestari serta mampu meningkatkan ekonomi pembudidaya ikan.</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>g. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memberikan kemudahan dan tidak mempersulit segala persyaratan program dan kegiatan bantuan pemerintah di Peraturan Menteri atau Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksanaan kepada kelompok nelayan, kelompok pembudidaya ikan, kelompok pengolah dan pemasar, kelompok petambak garam, organisasi sosial keagamaan kemasyarakatan/organisasi kepemudaan, lembaga pendidikan (pondok pesantren) yang berbadan hukum dan lain-lainnya sehingga akan mempercepat proses verifikasi dan validasi yang memerlukan cukup waktu, mengingat lokasi kelompok-kelompok calon penerima bantuan pemerintah jaraknya cukup jauh di setiap daerah.</p> <p>h. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mensosialisasikan program dan kegiatan yang berhubungan dengan bantuan masyarakat secara transparan, jelas dan komitmen di awal tahun 2021 sebagaimana evaluasi dalam Rapat Dengar Pendapat tanggal 21 Januari 2021, agar masyarakat yang berminat terhadap bantuan pemerintah kelautan perikanan dapat segera mengusulkan, melengkapi dan melakukan persiapan secara dini agar waktunya luas tidak mepet/sempit sehingga program dan kegiatan yang dituju/disasar dapat terealisasi dengan baik, aman, tepat sasaran, serta dapat membahagiakan seluruh rakyat Indonesia.</p> <p>i. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengkaji ulang kebijakan tata kelola daerah penangkapan ikan oleh kapal cantrang dan alat penangkapan</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>ikan (API) yang termasuk pukat hela dan pukat tarik di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) secara adil, tegas dan tuntas paling lama 1 (satu) bulan untuk dilaporkan kepada Komisi IV DPR RI, terutama kapal yang berukuran di bawah 30GT dan yang berukuran di atas 30GT, mengingat saat ini ada konflik horizontal/gejolak di lapangan karena belum ada pengaturan secara jelas.</p> <p>j. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan mendorong peningkatan dan pengembangan Program dan Kegiatan tahun 2021 di Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) dan Politeknik Kelautan Perikanan terutama bagi anak-anak pelaku utama kelautan perikanan agar mendapatkan pendidikan, dan pembinaan setelah lulus, seperti pendampingan modal usaha, ketrampilan (skill), pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.</p> <p>k. Komisi IV DPR RI mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam meningkatkan produksi perikanan melalui pengembangan kluster kawasan budi daya tambak dan pengembangan kampung budi daya udang, lele, patin, kerapu, lobster, rumput laut, dan ikan endemik/lokal Indonesia yang mempunyai nilai ekonomis dan berdaya saing agar tidak mengalami kepunahan.</p> <p>l. Komisi IV DPR RI mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan volume ekspor hasil kelautan perikanan secara bertahap hingga tahun 2024 melalui komoditas unggulan.</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>m. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyerap produk lokal yang dihasilkan pelaku usaha kelautan perikanan/UMKM, seperti kapal perikanan, alat penangkap ikan, pakan ikan, obat ikan, karamba, olahan berbahan dasar ikan, dan sejenisnya dalam rangka membantu perekonomian masyarakat kelautan perikanan termasuk perempuan pelaku usaha sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.</p> <p>n. Komisi IV DPR RI mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk terus menjaga ekosistem sumber daya ikan (SDI) di seluruh wilayah perairan Indonesia melalui peningkatan operasi kapal pengawas di Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, terutama di perairan yang berpotensi terjadinya <i>Illegal Unreported and Unregulated Fishing</i> (IUU Fishing).</p> <p>o. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan penyerapan realisasi anggaran bantuan pembiayaan permodalan dan membuat formulasi model sistem penyaluran dana kelola BLU-LPMUKP dan KUR sektor kelautan perikanan sehingga pelaku usaha kecil menengah dapat meningkatkan kualitasnya melalui pendampingan usaha budi daya, penangkapan, pengolahan dan pemasaran, jasa perikanan dan pergaraman serta masyarakat pesisir yang berdaya saing.</p> <p>p. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas, mutu dan kemasan produk hasil perikanan dalam penyaluran</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>bantuan pemerintah, seperti kegiatan gemarikan, bakti nelayan, bakti mutu karantina dalam rangka meningkatkan kesehatan dan imun tubuh masyarakat kelautan perikanan.</p> <p>q. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengevaluasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di pulau-pulau terluar Indonesia agar pembangunannya tidak mangkrak dan menjadi monumen sehingga perlu upaya memfokuskan beberapa SKPT saja yang menjadi prioritas untuk dikembangkan, mengingat anggarannya terbatas.</p> <p>r. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjalankan/operasional <i>Integrated Aquarium and Marine Research Institute</i> (IAMARI) di Kab. Pengandaran dan Pulau Morotai Maluku Utara guna optimalisasi pemanfaatan pembangunan yang sudah dilaksanakan.</p> <p>s. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyusun perencanaan Lumbung Ikan Nasional (LIN) di Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara yang sesuai dengan potensi, karakteristik dan peruntukan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).</p>
5.	KOMISI V	<p>1. Melakukan serangkaian kegiatan RDP dengan:</p> <p>a) Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR (26/01/2021)</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>b) Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR (27/01/2021)</p> <p>c) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (28/01/2021)</p> <p>d) Direktorat Jenderal Perumahan dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR (01/02/2021)</p> <p>e) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR (02/02/2021)</p> <p>f) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (04/02/2021)</p> <p>g) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (08/02/2021)</p> <p>h) BMKG dan Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan/BNPP (Basarnas) (09/02/2021)</p> <p>RDP yang dilakukan tersebut merupakan tindak lanjut Raker yang sudah dilakukan sebelumnya, guna membahas evaluasi pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2020 dan Program Kerja Tahun Anggaran 2021, dan hal lainnya. Dalam berbagai RDP dimaksud, Komisi V memberikan apresiasi kepada mitra kerja atas keberhasilan capaian realisasi keuangan dan realisasi fisik yang tinggi untuk Tahun Anggaran 2020 (Khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub yang berhasil mencapai realisasi fisik 100%). Namun, terdapat beberapa catatan Komisi V yang perlu menjadi perhatian pemerintah, antara lain:</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>a) Mendorong semua Mitra Kerja untuk mengutamakan alokasi Program Padat Karya Tunai yang memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat sesuai saran dan masukan Komisi V DPR RI.</p> <p>b) Meminta Direktorat Jenderal Bina Marga untuk melakukan penelitian umur jalan pasca konstruksi, dan meminta Direktorat Jenderal Bina Marga untuk mengkoordinasikan dengan BPJT agar segera melakukan perbaikan kerusakan pada jalan tol yang sudah operasional dalam rangka meningkatkan faktor keamanan, keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.</p> <p>c) Dalam melakukan lelang pengadaan barang dan jasa, meminta Direktorat Jenderal Bina Konstruksi untuk selalu melakukan koordinasi dengan unit organisasi terkait dalam rangka mencermati <i>track record</i> peserta lelang.</p> <p>d) Meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air untuk berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi agar Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) dalam melakukan lelang pengadaan barang dan jasa untuk lebih teliti dalam rangka mencermati <i>track record</i> peserta lelang dan melakukan evaluasi terhadap proses lelang yang dilakukan agar pelaksanaannya menjadi lebih transparan, berkualitas, dan akuntabel utamanya untuk nilai penawaran di bawah 80%.</p> <p>e) Sepakat dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian agar sisa lelang dalam anggaran Tahun 2021 dipergunakan kembali untuk</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>pelaksanaan program/kegiatan yang tertunda akibat <i>refocussing</i> di kabupaten/ provinsi tersebut.</p> <p>f) Mendorong Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan untuk memprioritaskan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>g) Meminta Direktorat Jenderal Perhubungan Laut agar meningkatkan manajemen dan pengelolaan di jalur laut yang bisa menjadi potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan meningkatkan konektivitas antar pulau, terutama pulau di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan belum berkembang dengan menggunakan kapal perintis.</p> <p>h) Meminta Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk memprioritaskan percepatan penyelesaian bandara yang sedang dibangun. Untuk bandara yang sudah dibangun namun belum optimal pemanfaatannya, mendesak Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk melakukan evaluasi terhadap bandara tersebut, serta segera menetapkan penentuan lokasi (penlok) terhadap bandara-bandara yang sudah direncanakan untuk dibangun.</p> <p>i) Sepakat dengan BNPP/Basarnas agar memprioritaskan asuransi dan jaminan keselamatan lainnya bagi tim operasi pencarian dan pertolongan dalam menjalankan kegiatannya.</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>j) Meminta BMKG untuk meningkatkan pemantauan terhadap fenomena iklim global seperti El Nino dan La Nina, curah hujan ekstrim, kejadian gempa bumi dan peringatan dini tsunami serta menginformasikannya kepada publik.</p> <p>k) Mendesak BMKG dan BNPP/Basarnas agar meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan sehingga tidak terjadi refocusing pada Tahun Anggaran 2021.</p> <p>2. Pada 3 Februari 2021, melaksanakan Raker dengan Menteri Perhubungan, Kepala BMKG, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Ketua KNKT, Dirut LPPNPI, Dirut PT. Jasa Raharja, Kepala RS Polri dan Dirut Maskapai Penerbangan Indonesia beserta jajaran. Raker dimaksud dilaksanakan untuk membahas mengenai Musibah Jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air SJ-182. Selain menyatakan prihatin dan turut berduka cita yang mendalam atas kecelakaan Pesawat Sriwijaya Air SJ-182 yang mengakibatkan korban jiwa, Komisi V juga menyoroti antara lain:</p> <p>a) Memberikan apresiasi kepada Kementerian Perhubungan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), BMKG, TNI/Polri dan pihak-pihak yang telah membantu atas kecepatan waktu tanggap (<i>response time</i>) serta upaya pencarian dan pertolongan korban kecelakaan Pesawat Sriwijaya Air SJ-182.</p> <p>b) Mendesak Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap operator maskapai penerbangan demi mengedepankan aspek keselamatan, keamanan dan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan transportasi.</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>c) Meminta KNKT untuk tetap menjaga independensi dan integritas dalam investigasi kecelakaan transportasi terkait jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air SJ-182 dan menyampaikan hasil laporannya kepada Komisi V DPR RI.</p> <p>d) Mendesak operator maskapai penerbangan PT. Sriwijaya Air dan PT. Jasa Raharja untuk segera menyelesaikan penyerahan santunan kepada pihak keluarga korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ-182 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
6.	KOMISI VI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan RI (Rabu, 3 Februari 2021), Pembahasan Rencana Pengesahan <i>Protocol to Implement The Tenth Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services</i> (Pengesahan Protokol untuk melaksanakan Komitmen paket ke 10 (Sepuluh) dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa). Komisi VI DPR RI memberikan Persetujuan atas Rencana Pengesahan Protokol tersebut dan merekomendasikan kepada Pimpinan DPR RI untuk ditindaklanjuti dan diteruskan kepada Presiden Republik Indonesia. 2. Rapat kerja dengan dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), (Rabu, 2 Februari 2021), Pembahasan mengenai kegiatan dan realisasi anggaran TA 2020 dan Rencana kegiatan dan anggaran sesuai DIPA Tahun 2021 3. Rapat kerja dengan Kementerian Perdagangan, (Rabu, 2 Februari 2021), Pembahasan mengenai kegiatan dan realisasi anggaran TA 2020 dan Rencana kegiatan dan anggaran sesuai DIPA Tahun 2021

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>4. Rapat kerja dengan Kementerian Perindustrian, (Selasa, 9 Februari 2021), Pembahasan mengenai kegiatan dan realisasi anggaran TA 2020 dan Rencana kegiatan dan anggaran sesuai DIPA Tahun 2021</p> <p>5. Fungsi pengawasan terhadap Pelaksanaan Keuangan Negara dan Kebijakan Pemerintah kepada Mitra Kerja BUMN yang terdiri atas: PT Semen Indonesia (Banten); dan PT Pupuk Indonesia (Banten) dan Perum Bulog (Banten) yaitu Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Provinsi Banten dan Penyampaian Kondisi Aktual BUMN</p> <p>6. Fungsi pengawasan terhadap Pelaksanaan Keuangan Negara dan Kebijakan Pemerintah kepada Mitra Kerja BUMN yang terdiri atas: PT Semen Indonesia (Narogong, Bogor) dan PT Pupuk Indonesia (Cirebon) dan Perum Bulog (Karawang) yaitu Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Provinsi Jawa Barat merupakan kelanjutan dari Kunjungan Kerja Spesifik Banten dan Penyampaiakan Kondisi Aktual BUMN</p> <p>7. Rapat kerja dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), (Rabu, 2 Februari 2021), Pembahasan mengenai kegiatan dan realisasi anggaran TA 2020 dan Rencana kegiatan anggaran sesuai DIPA Tahun 2021 serta Pembahasan mengenai pelaksanaan investasi di masa pandemi</p> <p>8. Rapat kerja dengan Kementerian Perdagangan (Rabu, 2 Februari 2021). Pembahasan mengenai kegiatan dan realisasi anggaran TA 2020 dan Rencana kegiatan dan anggaran sesuai DIPA Tahun 2021 serta Rencana pengesahan Protokol untuk melaksanakan komitmen paket kesepuluh dalam persetujuan kerangka kerja ASEAN</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>9. Rapat kerja dengan Mitra Kerja BUMN yang terdiri atas: PT Pegadaian; PT Permodalan Nasional Madani; dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, Pembahasan mengenai investasi Pemerintah dalam Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun Anggaran 2021</p> <p>10. Rapat kerja dengan Kementerian Perindustrian dalam (Selasa, 9 Februari 2021), Pembahasan mengenai kegiatan dan realisasi anggaran TA 2020 dan Rencana kegiatan dan anggaran sesuai DIPA Tahun 2021</p>
7.	KOMISI VII	<p>1. Kunjungan Kerja terkait RUU EBT pada tanggal 4-6 Februari 2021 mendapat masukan dari Rektor IPB University Bogor, Rektor Universitas Diponegoro dan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yaitu:</p> <p>a. IPB University Bogor</p> <ul style="list-style-type: none"> • IPB memiliki Pusat Penelitian Surfaktan dan Bioenergi (<i>Surfactant and Bioenergy Research Center/ SBRC</i>) terkemuka yang melibatkan multidisiplin keilmuan dan mampu memberikan manfaat yang seluas-luasnya kepada masyarakat secara nasional maupun global • Diharapkan IPB University Bogor dapat memberikan masukan yang sangat penting bagi pencapaian Target Bauran EBT Nasional paling sedikit sebesar 23% pada Tahun 2025 dan memperkaya khasanah substansi dalam penyusunan RUU EBT yang sedang diinisiasi oleh Komisi VII DPR RI.

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>b. Universitas Diponegoro</p> <ul style="list-style-type: none"> • RUU EBT diharapkan memberi ruang dan kemudahan bagi kelompok masyarakat yang mengusahakan Pembangkit Tenaga Listrik skala kecil seperti <i>Pico Hydro</i> untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sendiri. Atau juga TOSS (Tempat Olah Sampah Setempat) seperti di Bali yang menghasilkan briket untuk pembangkit listrik dan keperluan rumah tangga. • Diharapkan Universitas Diponegoro, Jawa Tengah dapat memberikan masukan yang sangat penting bagi pencapaian Target Bauran EBT Nasional paling sedikit sebesar 23% pada Tahun 2025 dan memperkaya khasanah substansi dalam penyusunan RUU EBT yang sedang diinisiasi oleh Komisi VII DPR RI. <p>c. Universitas Muhammadiyah Malang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pusat Pengembangan Listrik Tenaga Mikro Hidro, di Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur • Diharapkan Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur dapat memberikan masukan yang sangat penting bagi pencapaian Target Bauran EBT Nasional paling sedikit sebesar 23% pada Tahun 2025 dan memperkaya khasanah substansi dalam penyusunan RUU EBT yang sedang diinisiasi oleh Komisi VII DPR RI. <p>2. RDP dengan Kepala BPH membahas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Proses dan kendala program digitalisasi SPBU. b. Perkembangan Realisasi Program BBM satu harga.

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>c. Sosialisasi BPH Migas kepada masyarakat Tahun 2021.</p> <p>3. RDP dengan Direktur Utama PT PGN, Tbk membahas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Program Kerja Tahun 2021. b. Prospek ketersediaan Gas untuk didistribusi PGN Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024. c. Proyeksi Volume Gas yang akan didistribusikan PGN pada Tahun 2021. <p>4. RDP dengan Ketua Tim Percepatan Proyek <i>Electric Vehicle</i> (EV) Battery Nasional, Dirut PT Pertamina (Persero), Dirut MIN-ID, Dirut PT PLN (Persero), Dirut PT Antam, Tbk, Dirut PT LEN Industri (Persero), Kepala BPPT dan Kepala LIPI membahas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Roadmap</i> pengembangan industri <i>Electric Vehicle</i> (EV) baterai di Indonesia. b. Progress perencanaan dan pembentukan <i>holding</i> pabrik baterai untuk kendaraan listrik. c. Proses sinergi keikutsertaan BPPT dan LIPI dengan BUN terkait dalam pembentukan dan pelaksanaan <i>holding</i> pabrik baterai untuk kendaraan listrik. <p>5. RDP dengan Kepala SKK Migas membahas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Strategi SKK Migas dalam menahan penurunan alamiah produksi migas di Blok Cepu, Blok Mahkam dan Blok lainnya . b. Persiapan dam skenario SKK Migas dengan berlakunya UU Cipta Kerja. c. Perkembangan IDD untuk menopang <i>lifting</i> migas nasional.

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>6. RDP dengan Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy, dan Dirut PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) Mandailing Natal membahas penjelasan terkait kebocoran gas H₂S PT SMGP di Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara.</p> <p>7. Kunjungan Kerja Spesifik Masa Sidang III Tahun Sidang 2020-2021 dengan Direksi PT PLN (Persero), Direktur Utama, PT Pertamina Geothermal Energy, Dirjen EBTKE, Direksi PT Pertamina (Persero), Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala SKK Migas, Dirut PT Pertamina EP, Dirut PT Smelting, Dirjen Minerba Kementerian ESDM:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kunjungan ke PT Indonesia Power PLTP Kamojang di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat (Direksi PT PLN (Persero), Direktur Utama, PT Pertamina Geothermal Energy, Dirjen EBTKE) Kontribusi dan komitmen PLTP kamojang dalam rangka penyediaan energi listrik berbasis EBT. b. Kunjungan PT Pertamina EP Asset 3 Subang di Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat (Direksi PT Pertamina (Persero), Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala SKK Migas, Dirut PT Pertamina EP) Optimalisasi kemampuan produksi dan lifting migas PT Pertamina EP Asset 3 Subang Field. c. Kunjungan PT Pertamina EP Asset 3 Subang di Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat (Direksi PT Pertamina (Persero), Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala SKK Migas, Dirut PT Pertamina EP) Optimalisasi kemampuan produksi dan lifting migas PT Pertamina EP Asset 3 Subang Field.

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		RDP dengan Duta Besar Rusia membahas <i>Courtesy Call</i> terkait kerja sama bilateral dalam bidang energi.
8.	KOMISI VIII	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panja RUU Penanggulangan Bencana belum ada kegiatan, masih menunggu penetapan Prolegnas 2021. Sedangkan RUU Kesejahteraan Lanjut Usia masih menunggu proses harmonisasi dan sinkronisasi di Baleg. 2. Belum ada Kegiatan Rapat Anggaran dengan Mitra Kerja Komisi VIII DPR RI. 3. Raker dengan Menteri Agama RI untuk evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2020 dan membahas isu aktual dan solusinya (tanggal 18 Januari 2021) dan Pembicaraan Pendahuluan BPIH 1442 H/2021 M serta Pembentukan Panja BPIH (tanggal 19 Januari 2021). 4. Kunker Spesifik ke Depok, Cianjur, dan Serang (21-23 Januari 2021) dan Purwakarta, Majalengka, dan Cilegon (27-29 Januari 2021) terkait pelaksanaan fungsi pengawasan dan fungsi anggaran terhadap masalah bencana, sosial, dan agama.
9.	KOMISI IX	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan rapat penyusunan RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan. Tim Asistensi menganalisis masukan berbagai pihak dan memberikan masukan ke Panja untuk penyempurnaan draf RUU. Panja akan melakukan penyempurnaan draf RUU pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021. 2. Melakukan Raker dengan Kementerian Kesehatan (1-2 Februari 2021) untuk membahas APBN 2021 dan Anggaran Penanganan Covid-19. Total APBN yang disahkan sebesar Rp84,3 triliun, dengan rincian sebesar Rp57,9 triliun dialokasikan untuk prioritas nasional (meliputi: Rp 48,7

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>triliun untuk PBI JKN; 0,8 triliun untuk peningkatan kesehatan ibu dan anak; Rp2,1 triliun untuk percepatan perbaikan gizi masyarakat; Rp 3,1 triliun untuk pengendalian penyakit; Rp 0,3 T untuk Germas); Rp19,0 triliun untuk prioritas bidang; Rp5,7 triliun untuk belanja pegawai; dan Rp1,7 triliun untuk belanja operasional perkantoran.</p> <p>3. Melakukan Raker dengan Menteri Kesehatan dan Menteri Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan RDPU dengan UGM dan Lembaga Eijkman (3 Februari 2021) untuk membahas hasil riset dan inovasi dalam rangka pengendalian pandemi COVID-19 serta membahas vaksin Merah Putih. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk: (1) melakukan terobosan kebijakan agar hasil riset dan inovasi dapat segera digunakan dalam pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan melalui E-katalog; (2) mengakselerasi perluasan penggunaan GeNose C-19 dalam <i>testing</i> dan <i>tracing</i> COVID-19 dengan dukungan Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN dan UGM untuk peningkatan produksi massal. Komisi X DPR RI mendukung penuh pengembangan Vaksin Merah Putih dan mendesak Kemenristek/BRIN bersama Kementerian Kesehatan RI berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait percepatan proses pengembangan Vaksin Merah Putih sesuai dengan Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan dan Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin Corona Virus. Komisi IX DPR RI juga mendesak Kemenristek/BRIN bersama Kementerian Kesehatan RI meningkatkan Kerja sama pemerintah dengan Badan Usaha</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>(KPBU) di bidang penelitian dan pengembangan, termasuk dengan lembaga riset, universitas, serta industri farmasi dan alat kesehatan, baik lokal maupun multinasional.</p> <p>4. Melakukan Kunler Spesifik ke RSUP dr Sitanala Banten, RSUP Hasan Sadikin Bandung, dan RSUP Surakarta Solo Pengawasan dalam rangka peningkatan jumlah tempat tidur untuk Covid-19 di rumah sakit vertikal. Dalam Raker dengan Komisi IX DPR RI (12 Januari 2021) Menteri Kesehatan berencana melakukan penambahan kapasitas tempat tidur Covid-19 di rumah sakit vertikal sebanyak 30-40% dari kapasitas rumah sakit. Hal ini diperkuat dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan No. HK 02.01/Menkes/11/2021 tentang Peningkatan Kapasitas Perawatan Pasien Covid-19 pada RS Penyelenggara Pelayanan Covid-19 dan Surat Edaran Menteri Kesehatan No. HK 02.01/Menkes/12/2021 tentang Peningkatan Kapasitas Perawatan Pasien Covid-19 pada RS Penyelenggara Pelayanan Covid-19 di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan menginstruksikan kepada RS yang berada di zona merah untuk menambah atau mengalihfungsikan tempat tidur minimal 40% untuk ruang isolasi pasien Covid-19 dan 25% ruang ICU. Untuk RS yang berada di zona kuning diinstruksikan mengalihfungsikan tempat tidur sebanyak 30% dan ICU 20%. Untuk zona hijau, diharapkan mengalihfungsikan 25% dan penambahan ICU 15%.</p> <p>5. Melakukan uji kelayakan (<i>fit and proper test</i>) bagi calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan mulai tanggal 21 Januari 2021 (pembuatan makalah); 25-26 Januari 2021 (uji kelayakan calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan); dan 27-</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>28 Januari 2021 (uji kelayakan calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan). Berdasarkan hasil uji kelayakan serta mempertimbangkan masukan masyarakat, Komisi IX DPR RI memilih Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan periode 2021-2026 berdasarkan musyawarah untuk mufakat sesuai Pasal 308 ayat (2) Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.</p>
10.	KOMISI X	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Draf RUU sudah dikirimkan ke Baleg pada MP II TS 2020-2021 untuk dilakukan Harmonisasi, sinkronisasi dan pembulatan konsep RUU. 2. Mendapatkan penugasan dari Pimpinan DPR RI untuk melakukan pembahasan RUU Tentang Praktik Psikologi berdasarkan surat Pimpinan DPR RI Nomor: PW/00074/DPRRI/I/2021, tertanggal 19 Januari 2021 Akan dibahas terlebih dahulu dalam Rapat Internal Komisi X DPR RI. 3. Mendapatkan penugasan dari Pimpinan DPR RI untuk membahas keputusan DPD RI terkait RUU Usul Inisiatif Tentang Keolahragaan, berdasarkan surat Pimpinan DPR RI Nomor: PW/00075/DPRRI/I/2021, tertanggal 19 Januari 2021 4. Pertemuan dengan Kemenparekraf/Baparekraf RI membahas tentang: <ol style="list-style-type: none"> a. Daya serap anggaran TA 2020 mencapai 92,56%.

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>b. Terdapat refokusing APBN TA 2021 sebesar Rp3,42 Milyar, sehingga Komisi X mendorong untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - melakukan simulasi anggaran yang ada secara cermat dan teliti agar capaian target program prioritas tetap terwujud. - koordinasi dengan Kemenkeu agar penggunaan anggaran tetap untuk pelaksanaan parekraf. <p>c. Persiapan program dan kegiatan TA 2021, agar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - program prioritas dilengkapi dengan sasaran/target dan diimplementasikan secara terukur dan berdampak signifikan. - mengembangkan destinasi wisata terintegrasi dengan melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Pemda. - mengalokasikan anggaran dalam bentuk DAK fisik regular dan penugasan, termasuk DAK sektor Ekraf ke daerah. - menggali dan mengembangkan destinasi wisata potensial di daerah. - orientasi kepada wisman dialihkan kepada wisnus - membantu ketersediaan bahan baku ekraf. - akselerasi penyelesaian RPP sebagai turunan UU No.24 Tahun 2019 tentang Ekraf. <p>d. Memastikan anggaran pariwisata sebesar Rp14,2 Triliun (sebelum refokusing) di APBN TA 2021, penggunaannya untuk pengembangan pariwisata.</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>e. pengembangan desa wisata, didorong untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - menyelesaikan kajian secara komprehensif mengenai proyeksi pembangunan desa wisata. - meningkatkan koordinasi lintas sektoral dan kolaborasi dengan komunitas serta perguruan tinggi. - mendukung program pendampingan 244 Desa Wisata menjadi desa wisata mandiri. jaminan alokasi anggaran dalam bentuk DAK secara berkala untuk setiap tahunnya. <p>5. Pertemuan dengan Perpustakaan Nasional membahas:</p> <p>a. Daya serap anggaran TA 2020 mencapai 96,62%.</p> <p>b. Koordinasi dan pemdampingan terhadap pelaksanaan DAK Fisik pembangunan gedung perpustakaan di 7 Kabupaten/Kota pada TA 2020.</p> <p>c. Rencana refocusing anggaran TA 2021 perlu kajian dan berkoordinasi dengan Kemenkeu RI, agar capaian target tetap terwujud.</p> <p>d. Mendorong perpusnas untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maksimalisasi penyerapan DAK Fisik sub bidang Perpusda TA 2021 sejumlah Rp 550 miliar. - mengoptimalkan data hasil riset terintegrasi antara Perpusnas RI, Perpusda, dan Perpustakaan Desa. - kerja sama dengan lembaga penelitian kredibel terkait layanan berbasis inklusi sosial. - Implementasi UU 3/2018 Sistem Perbukuan, UU 13/2018 SSKCKR, UU 5/2017 Pemajuan Kebudayaan.

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<ul style="list-style-type: none"> - penyusunan <i>roadmap</i> pengembangan perpustakaan. - menjadikan perpustakaan sebagai wahana pendidikan alternatif selain sekolah. - adaptif terhadap perkembangan IT dan antisipatif menyiapkan SDM. <p>e. Koordinasi dengan Kemenkeu RI serta Bappenas RI untuk meningkatkan alokasi anggaran Perpustakaan RI.</p> <p>6. RDP gabungan dengan Eselon I Kemendikbud RI, Kemendagri RI, Kemendes PDT dan Transmigrasi RI. Kemenkominfo RI. Perpustakaan RI yang mendorong K/L terkait, sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya bersama Perpustakaan RI untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - membuat indikator capaian literasi yang terintegrasi. - membuat peta kebutuhan bahan pustaka, skema akselerasi pengadaan serta pendistribusiannya. - melakukan kerjasama dalam bentuk MoU untuk peningkatan literasi di daerah. - mengembangkan pola perilaku literasi melalui kegemaran membaca. - mengusulkan adanya hari membaca nasional. - berkoordinasi memastikan penambahan dan penguatan jaringan internet di daerah 3T. sinergi dengan program merdeka belajar. <p>7. RDP/RDPU Panja Peta Jalan Pendidikan masih berjalan dan ditargetkan selesai pada akhir masa persidangan III Tahun Sidang 2020-2021.</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
11.	KOMISI XI	<p>1. Rapat kerja dengan Menteri Keuangan membahas Pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (24 Januari 2021). Butir-butir penting dalam rapat tersebut adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menteri Keuangan agar segera menyampaikan <i>road map</i> atau <i>business plan</i> Lembaga Pengelola Investasi (LPI). b. Komisi XI DPR RI mendukung upaya Menteri Keuangan membangun LPI untuk memenuhi prinsip-prinsip tata Kelola Lembaga yang profesional, <i>good governance</i>, memiliki kinerja komersial dan manfaat pelayanan publik yang seimbang, serta berkontribusi dalam pembangunan nasional. c. Menteri Keuangan selaku Pembina dan Ketua Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi (LPI) menyampaikan aset-aset yang merupakan pengelolaan cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dan aset-aset pengelolaan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk dibahas bersama Komisi XI DPR RI. d. Menteri Keuangan agar segera membuat syarat dan ketentuan mengenai: <ul style="list-style-type: none"> - Kerjasama LPI dan Pemerintah untuk optimalisasi aset negara melalui kuasa kelola dan/atau bentuk kerjasama lainnya tanpa melalui pemindahtanganan aset, agar tetap menempatkan kekuasaan Pemerintah dalam melakukan fungsi pengelolaan, pengurusan, pengaturan, dan pengawasan, serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Kriteria sektor dan jenis usaha perusahaan patungan tertentu, yang mensyaratkan agar LPI memiliki porsi kepemilikan mayoritas, menjadi penentu utama kebijakan usaha dan penentu dalam pengambilan keputusan. - Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) berkaitan dengan perlakuan perpajakan dalam transaksi LPI untuk dikonsultasikan dengan Komisi XI DPR RI. <p>2. RDP dengan PT PLN (Persero), PT BPUI (Persero), dan LPEI membahas Laporan penggunaan dana PMN dan PMN Tahun 2021 (18-20 Januari 2021). Butir-butir penting dalam rapat tersebut adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Komisi XI DPR RI telah melakukan pendalaman pembiayaan investasi PMN Tahun 2021 terhadap 3 (tiga) BUMN, yaitu: PT PLN (Persero), PT BPUI (Persero), dan LPEI. b. Panja PMN Komisi XI DPR RI pada masa sidang yang akan datang akan memprioritaskan untuk membahas BPUI dan LPEI. <p>3. Rapat Kerja tentang Penyampaian Hasil Pendalaman Pembiayaan Investasi PMN Tahun 2021 (8 Februari 2021). Butir-butir penting dalam rapat tersebut adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Komisi XI DPR RI telah melakukan pendalaman Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2021 dan memberikan catatan serta rekomendasi-rekomendasi untuk ditindak lanjuti (hasil pendalaman, catatan dan rekomendasi terlampir). b. Menteri Keuangan dalam penatausahaan dan mengelola Penyertaan Modal Negara (PMN) agar menerapkan perencanaan PMN yang memperhatikan hal-hal yang meliputi: <i>road map</i>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>BUMN sebagai agen pembangunan, rencana jangka panjang dan menengah atas investasi pemerintah di Badan Layanan Umum (BLU), kinerja perusahaan, kinerja keuangan, manfaat PMN dan indikatornya, pengembalian nilai pokok investasi, dan indikator-indikator capaian lainnya dalam pemberian PMN.</p> <p>c. Komisi XI DPR RI mendukung upaya Menteri Keuangan dalam mengelola pembiayaan investasi sebagaimana ditetapkan dalam UU APBN 2021 dan mengutamakan prioritas penggunaannya bermanfaat bagi rakyat.</p> <p>d. Rencana right issue BRI yang ditindaklanjuti dengan proses pembentukan holding ultra mikro telah dikonsultasikan Menteri Keuangan kepada Komisi XI DPR RI. Selanjutnya Menteri Keuangan agar menyampaikan dokumen terkait pembentukan holding ultra mikro dan Key Performance Indicators (KPI) yang meliputi, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan profitabilitas. - Efisiensi bisnis. - Sinergitas BUMN. - Penurunan cost of fund. - Penciptaan Lapangan Pekerjaan. - Kemudahan Akses Layanan Keuangan. - Target capaian kinerja keuangan holding dan anak perusahaan. - Dalam menjaga iklim usaha yang kondusif.

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>Untuk dikonsultasikan dengan Komisi XI DPR RI.</p> <p>e. Menteri Keuangan berkomitmen memberikan data-data dan dokumen serta jawaban tertulis atas pertanyaan dan tanggapan Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI maksimal awal Masa Sidang IV Tahun Sidang 2020-2021.</p> <p>4. Komisi XI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik tanggal 5-7 Februari 2021 terkait Fungsi Pengawasan dalam rangka Penerimaan Negara pada Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan di beberapa daerah, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jawa Barat I Kota. b. Jawa Barat I Kota Bogor. c. Jawa Barat I Kota Tangerang Selatan. d. Provinsi Jawa Barat. e. Kota Tangerang Selatan. <p>5. Komisi XI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses terkait Fungsi Pengawasan tanggal 15-19 Februari 2021 ke tiga daerah yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Sumatera Selatan, dengan tujuan ke:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan; b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia; c. Kantor Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan; d. Kantor Perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan; dan

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		e. Kantor Perwakilan Perbankan.
12.	BADAN LEGISLASI (BALEG)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas persiapan Raker dengan Menkumham dan PPUU DPD RI terkait Prolegnas Perubahan RUU Tahun 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas RUU Tahun 2021, 14 Januari 2021. 2. Raker dengan Menkumham dan PPUU DPD RI terkait Pengambilan keputusan terhadap Prolegnas Perubahan RUU Thn 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas RUU Tahun 2021, 14 Januari 2021. 3. RDPU Baleg dengan akademisi dan praktisi Pemilu, yaitu Ramlan Surbakti (Ketua KPU priode 2004-2007), Dr. Nur Hidayat Sardini (Ketua Panwaslu Provinsi Jawa Tengah periode 2003-2004, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum/BAWASLU, periode 2008-2011, Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu/DKPP periode 2012-2017), dan Titi Anggraini (Anggota Dewan Pembina PERLUDEM/Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi), 19 Januari 2021. 4. RDPU Baleg dengan pakar politik dan praktisi Hukum Pidana, yaitu Prof Topo Santoso (Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia) dan Prof Kacung Marijan (pakar politik Universitas Airlangga) terkait Harmonisasi RUU tentang Pemilu, 20 Januari 2021. 5. Kunker ke Serang (Banten) 21-23 Jan 2021, Bandung (Jabar) 24-26 Jan 2021, dan Semarang (Jateng) 27-29 Jan 2021, dalam rangka Pemantauan dan Peninjauan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. 6. RDPU dengan <i>International NGO Forum on Indonesian Development</i> (INFID) dan perwakilan <i>The Bodyshop</i> dalam rangka penyusunan RUU tentang PKS, 2 Februari 2021.

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		7. RDPU dengan pakar dan praktisi Ketahanan Pangan, yaitu Prof. Dr. Ir. Siti Subandiyah, M.Agr.Sc (Guru Besar Fak. Pertanian UGM), Ir. Sutarto Alimoeso, M.M (praktisi ketahanan pangan/Dirut Perum Bulog 2009-2014), dan Khudori (Anggota Pokja Dewan Ketahanan Pangan Tahun 2010-2020) terkait Pemantauan dan Peninjauan UU UU Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pangan, 9 Februari 2021.
13.	BADAN URUSAN RUMAH TANGGA (BURT)	<p>1. Kunjungan Kerja dalam rangka pengawasan pelayanan Jamkestama untuk Anggota DPR beserta keluarganya a</p> <p>2. Rapat BURT dengan Setjen DPR RI, 4 Februari 2021 dengan agenda: Nota Penjelasan Sekjen DPR RI tentang Realisasi Anggaran DPR RI Triwulan IV Tahun 2020 Satker Dewan dan Satker Setjen.</p> <p>a. BURT meminta Sekjen agar proses perencanaan anggaran dapat dilakukan lebih akurat, efektif, dan efisien sehingga kinerja realisasi anggaran, <i>output</i>, dan <i>outcome</i> lebih optimal.</p> <p>b. BURT membentuk Panitia Kerja (Panja) yaitu:</p> <p>1). Panja Realisasi Anggaran DPR RI Triwulan IV Tahun 2020 Satker Dewan, dan</p> <p>2). Panja Realisasi Anggaran DPR RI Triwulan IV Tahun 2020 Satker Setjen.</p> <p>Panja Pembahasan Realisasi Anggaran DPR RI TW IV Tahun 2020 Satker Dewan dan Setjen diagendakan pada Masa Sidang IV Tahun Sidang 2020-2021.</p>
14.	BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA (BAKN)	1. Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan PT PLN terkait penelaahan subsidi listrik. (Rapat tertutup pada 28 Januari 2021)

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Rapat Kerja dengan Menteri ESDM, Wamen Keuangan dan Wamen BUMN terkait LHP BPK RI tentang Kebijakan Subsidi Energi baik subsidi BBM tertentu, Gas, dan Listrik (Rapat terbuka pada 4 Februari 2021). 3. Kunjungan kerja ke Kota Cilegon dalam rangka memperoleh masukan dari Pemerintah Daerah Kota Cilegon atas penelaahan BAKN DPR RI dengan tema kebijakan pengelolaan subsidi energi (25-27 Januari 2021). 4. Kunjungan kerja ke Kota Cirebon dalam rangka memperoleh masukan dari Pemerintah Daerah Kota Cirebon atas penelaahan BAKN DPR RI dengan tema kebijakan pengelolaan subsidi energi (1-3 Februari 2021). 5. Konsinyering penyusunan laporan penugasan Pimpinan DPR RI terkait penelaahan atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada PT Patra Jasa serta Anak Perusahaannya, PNBP BPOM, dan Subsidi Energi (5-7 Februari 2021). 6. Rapat konsultasi dengan BPK RI terkait LHP BPK RI tentang Kebijakan Subsidi Energi (9 Februari 2021).
15.	BADAN KERJASAMA ANTAR PARLEMEN (BKSAP)	<p>Kunjungan daerah dalam rangka BKSAP Day</p> <p>BKSAP Day bertujuan untuk memberikan informasi tentang tugas dan fungsi BKSAP dan pelaksanaan Diplomasi Parlemen DPR RI. Dalam BKSAP Day ke Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat tgl. 20 – 22 Januari 2021, dipimpin oleh Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc (F-PGerindra) dengan Anggota Delegasi Fadhlullah (F-PGerindra), Mulan Jameela (R.Wulansari) (F-PGerindra), Hj.</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>Himmatul Aliyah, S.Sos., M.Si (F-PGerindra) dengan tema : Diplomasi Parlemen DPR RI di masa pandemi Covid-19. Menghadirkan civitas akademika dari Universitas Garut dan Institut Pendidikan Indonesia.</p> <p>Kunjungan Diplomasi BKSAP DPR RI ke Ubekistan (27 – 29 Januari 2021), dgn pertemuan sbb :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dubes RI di Tashkent, membahas perkembangan WNI di masa Pandemi di Tashkent dan peluang-peluang kerjasama potensial antara Indonesia – Uzbekistan, antara lain perdagangan buah tropis, bidang pertahanan, dan bidang kesehatan. - Wakil Ketua Parlemen Uzbekistan yang membahas beberapa hal penting terkait kerjasama kedua negara melalui hubungan bilateral yang terbangun antara parlemen Uzbekistan dan DPR RI, antara lain mengenai penanganan pandemi COVID-19, kerjasama perdagangan, investasi, pariwisata dan pendidikan. Selain itu, Uzbekistan dan Indonesia yang merupakan negara dimana mayoritas penduduknya adalah Muslim, berkomitmen untuk menjunjung tinggi penegakan HAM dan penerapan demokrasi. - National Center of the Human Rights of Uzbekistan yang membahas komitmen Indonesia dan Uzbekistan dalam perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi seluruh warga negara. DPR RI selama ini berkomitmen dalam menyuarakan dukungan terhadap penegakan HAM khususnya dalam isu Palestina, Rohingya, dan Uyghur di berbagai forum multilateral

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>seperti AIPA, APPF, dan IPU. DPR RI juga menyampaikan ucapan selamat kepada Uzbekistan dimana untuk pertama kalinya terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2021-2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Kesehatan Uzbekistan yang membahas potensi kerja sama yang dapat dikembangkan antara Indonesia dan Uzbekistan di bidang asuransi kesehatan, vaksinasi, <i>joint research</i>, dan pertukaran pelajar serta dokter. Terkait vaksin COVID-19, Indonesia dan Uzbekistan sama-sama tergabung dalam aliansi <i>COVAX Facility</i> yang merupakan inisiatif multilateral yang bertujuan mempercepat pengembangan, produksi, dan akses vaksin yang merata. Terkait upaya pencapaian <i>Universal Health Coverage</i>, ditegaskan bahwa dibutuhkan komitmen nasional untuk mewujudkan akses kesehatan yang merata untuk semua warga negara. - Memberikan kuliah umum tentang tugas dan fungsi BKSAP dan pelaksanaan Diplomasi Parlemen DPR RI di University of World Economy and Diplomacy (UWED) Uzbekistan dengan presentasi yang berjudul "<i>The Role of Parliaments in Addressing Global Challenges</i>". Parlemen dengan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang dimilikinya memiliki peran penting dalam menjawab berbagai tantangan global baik terkait pandemi COVID-19, pembangunan berkelanjutan, ekonomi, dan keadilan. Melalui fungsi diplomasi parlemen, DPR RI berkomitmen untuk mendukung penegakan HAM, khususnya terkait isu Rohingya,

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>Uyghur, dan kemerdekaan Palestina sebagaimana yang selama ini telah dilakukan di berbagai forum multilateral parlemen antara lain AIPA, APPF, PUIC, dan IPU.</p> <p>- Industri Farmasi Uzbekistan (Uzbekistan Agency for Pharmaceutical Industry Development) membahas berbagai potensi investasi di bidang farmasi dan pihak Uzpharma menyatakan siap bekerja sama dengan Indonesia dalam pengembangan, penelitian, serta inovasi terkait industri farmasi kedua negara, termasuk kerjasama terkait produk temuan Indonesia bernama "GeNose" yang saat ini diharapkan mampu mendeteksi seseorang yang mengidap COVID-19 dengan mudah yakni dengan hembusan nafas.</p> <p>Komite Negara Republik Uzbekistan bidang Industri Pertahanan, membahas berbagai upaya untuk memperkuat kerja sama yang telah terbangun antara kedua negara di bidang industri pertahanan yang merupakan salah satu sektor strategis yang selama ini dilakukan oleh Indonesia dan Uzbekistan.</p> <p>FGD BKSAP bekerjasama dengan WFD dengan tema "Balancing the Economy and Environment in the Struggle of Post Covid-19 Recovery: Promoting System of Environmental Economic Accounting in Financial Oversight of the Parliament". Diselenggarakan pada tanggal 2 Februari 2021, di Hotel Novotel, Bogor.</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, bekerja sama dengan Westminster Foundation for Democracy (WFD), mengadakan diskusi kelompok terpumpun (DKT) untuk menghimpun pandangan dan menjajaki peluang bagi peran parlemen yang lebih aktif—khususnya pandangan dari sisi keuangan tentang kinerja Pemerintah dalam pertumbuhan hijau. Beberapa hal yang diangkat adalah situasi terkini agenda pertumbuhan hijau Indonesia, kemajuan Indonesia terhadap NDC, penggunaan sistem neraca ekonomi dan lingkungan (<i>the System of Environmental Economic Accounting</i> [SEEA]) oleh Pemerintah, dan potensi SEEA digunakan sebagai alat pengawasan keuangan oleh DPR RI, khususnya BAKN DPR RI. FGD ini juga bertujuan mengetahui praktik baik di parlemen lain, termasuk Public Accounts Committee (PAC) dari House of Commons di Inggris.</p> <p>Rapat Internal (2 Feb) dan Courtesy Call GKSB DPR RI – Parlemen Kroasia dengan Dubes Kroasia (3 Feb)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam pertemuan ini kedua belah pihak menegaskan kembali dukungan untuk penguatan kerjasama antara kedua negara. GKSB mengusulkan skema <i>travel bubble</i> Indonesia-Kroasia, pemberlakuan bebas visa bagi WNI yang akan berkunjung ke Kroasia, di bidang perdagangan dengan memanfaatkan Kroasia sebagai pintu masuk produk Indonesia seperti CPO ke Eropa, mengembangkan potensi wisata bahari dan halal serta pedesaan, serta memanfaatkan posisi strategis kedua negara dalam konteks kawasan.

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Dubes mendorong mahasiswa Indonesia untuk belajar bidang pariwisata di Kroasia. Kroasia yang memiliki industri pariwisata maritim dan halal, juga aktif mengikuti perkembangan konferensi Negara-negara Islam (OIC). Dalam bidang olahraga khususnya sepak bola, sebagai pemenang Piala Dunia, Kroasia tengah memberikan pelatihan sepak bola bagi Tim Garuda Muda Indonesia. Dalam isu keamanan Kroasia bersedia melakukan kerjasama pengadaan langsung (<i>direct procurement</i>) dan transfer pengetahuan (<i>transfer of knowledge</i>) seperti keamanan siber (<i>cyber security</i>), IT (keamanan perbankan) forensik siber (<i>cyber forensic</i>) dan mendorong kerjasama dibidang alutsista. <p>Konsultasi Terbatas Pimpinan BKSAP dengan jajaran Rektorat Universitas Pertahanan (8 Februari 2021)</p> <p>Dalam rapat konsultasi tersebut, BKSAP mendapat berbagai masukan antara lain mengenai aspek-aspek yang harus diperhatikan terkait kerja sama keamanan maritim Indo-Pasifik, diplomasi Konservasi Sumber Daya Laut, diplomasi kedaulatan perbatasan samudera lepas, diplomasi kedaulatan pasifik selatan, diplomasi kedaulatan sistem persenjataan tanpa awak, diplomasi kedaulatan dalam penggunaan e-bomb di kawasan, dan diplomasi kedaulatan <i>spill-over effect</i> akibat konflik Laut Tiongkok Selatan. Indonesia sebagai negara <i>non-claimant</i> di Laut Tiongkok Selatan juga dapat terdampak jika konflik di kawasan Indo-Pasifik bereskalasi, salah satunya misalnya dalam penggunaan e-bomb sebagai instrument perang di Laut Tiongkok Selatan. BKSAP sebagai ujung tombak diplomasi parlemen dapat menginisiasi maupun</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>menjembatani komunikasi dengan parlemen negara-negara sahabat dalam berbagai forum antar parlemen terkait isu-isu tersebut.</p> <p>Melalui pertemuan ini, Pimpinan BKSAP berharap dapat terwujud kolaborasi dan kerja sama strategis antara DPR RI dan Universitas Pertahanan dalam rangka meningkatkan sinergi parlemen dan academia melalui kerangka <i>total diplomacy</i> guna mencapai kepentingan nasional Indonesia.</p> <p>Courtesy Call GKSB DPR RI – Parlemen Korea Selatan dengan Duta Besar Korea Selatan (8 Februari 2021)</p> <p>Dalam pertemuan dengan Duta Besar Korsel, kembali ditegaskan keinginan DPR RI untuk terus meningkatkan kerjasama dengan Korsel dalam berbagai bidang, tidak hanya dalam hubungan antar parlemen, namun juga mendorong kerjasama dalam bidang perekonomian, perdagangan, investasi, pertanian, perikanan, kehutanan, pendidikan, budaya maupun pengembangan energi baru dan terbarukan.</p> <p>DPR RI telah membentuk Grup Kerjasama Bilateral dengan Parlemen Korsel dan Parlemen Korsel juga dalam proses pembentukan grup serupa yang diharapkan akan selesai pada akhir Februari ini. Kerjasama untuk pemberdayaan perempuan juga diharapkan dapat terus ditingkatkan dengan adanya Kaukus Perempuan Parlemen di Indonesia, dan akan dibentuk kaukus serupa di Parlemen Korsel.</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p><i>Webinar co-organized by the South East Asian Parliamentarians against Corruption (SEAPAC) and the House of Representatives of the Republic of Indonesia. Webinar ini diselenggarakan pada tanggal 9 Februari 2021 di Hotel Pullman, Bogor.</i></p> <p>BKSAP DPR-RI bekerjasama dengan SEAPAC (South East Asia Parliamentarians Against Corruption) mengadakan information webinar dengan tema “<i>The UN General Assembly Special Session against corruption (UNGASS) 2021: What role are there for parliamentarians?</i>” Webinar ini diselenggarakan sebagai bagian dari seminar informasi tentang UNGASS 2021 dan alat eksplorasi untuk mengelaborasi prioritas kawasan melalui pertukaran praktik-praktik terbaik dan tantangan-tantangan yang ada. Webinar ini juga diharapkan dapat menjadi platform di mana parlemen dan anggota parlemen dapat mengeksplorasi kemungkinan cara-cara dan langkah-langkah untuk memastikan implementasi yang efektif dari hasil keluaran UNGASS 2021: Deklarasi Politik. Sidang khusus UNGASS ini akan menjadi momen penting untuk memberikan dorongan politik yang lebih kuat bagi gerakan antikorupsi global, khususnya untuk Negara-negara Asia Tenggara telah berkomitmen untuk mengambil berbagai langkah-langkah penanganan korupsi. UNGASS mendatang juga merupakan kesempatan bagi SEAPAC untuk memperkuat kesadaran parlemen Negara-negara Asia Tenggara tentang agenda global ke depan dalam konteks anti-korupsi dan tata pemerintahan yang baik.</p> <p>Kunjungan daerah dalam rangka BKSAP Day</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		BKSAP Day ke Provinsi Bangka Belitung, tgl 4-6 Februari 2021, Dipimpin oleh Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc (F-PGerindra) dengan Anggota Delegasi Puteri Anetta Komarudin, B.Com (F.P.Golkar), Fadhlullah (F.P.Gerindra) dengan tema : Diplomasi Parlemen Sebagai Bagian dari Diplomasi Total Indonesia. Menghadirkan civitas akademika Universitas Bangka Belitung dan Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung.
16.	MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN (MKD)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan evaluasi Perubahan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik dan Peraturan DPR RI Nomor 2 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan dan menyusun rancangan Kode Etik Sistem Pendukung; 2. Menyusun kajian perkara; 3. Persiapan Seminar Nasional Mahkamah Kehormatan Dewan; 4. Melakukan kunjungan kerja dalam rangka mencari masukan terkait evaluasi perubahan Kode Etik DPR RI dan Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan ke Polres, Polresta dan Kejari Kota Bogor, Kota Tangerang, dan Kota Bekasi serta mengundang DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan akademisi dalam pertemuan tersebut.

Keterangan : Info Dwi Mingguan Dikelola oleh Tim Gabungan / Sinergi antara Badan Keahlian, Para Kabag Set AKD Deputi Persidangan, dan Tenaga Ahli AKD